

**KEBIJAKAN RUSIA MENGELUARKAN HAK VETO TERHADAP
RANCANGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB TENTANG KONFLIK SIPIL
DI SURIAH**

Oleh:

Sabrina Nurastuti Sudirman Putri¹

Yessi Olivia²

Email and Phone: boysphobia@yahoo.com / +628 5729 832 525

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This paper describes Russia's decision in issuing veto against the UN Security Council resolution drafts on Syria civil conflict in 2011 to 2012. The conflict in Syria is a civil conflict that demands the Syrian president to step down. In the face of the civil conflict, the Syrian government often used military and armed forces that resulted in the loss of life of many civilians. Seeing the Syrian government action taken in the face of this conflict, the UN Security Council drafted resolutions on Syria to help resolve the internal conflicts. The first draft of the UN Security Council resolution was made in 2011 and was vetoed by Russia and China. The second UN Security Council resolution was drafted back in 2012, and Russia and China once again vetoed it. The theory applied in this research is foreign policy and the rational actor model with nation-state as the level of analysis. Foreign policy, based on the rational actor model is considered as a result of the actions of rational actors. Analysis of the nation-state level to examine how a decision can be made to produce a policy. Sources of data used in this study is from books, journals, newspapers and the Internet. The study finds that the two vetos by Russia at the sessions of the UN Security Council were taken because Russia has a political and security interests in Syria. Russia does not want to lose its influence and hegemony in Syria.

Keywords: foreign policy, the Security Council resolution, civil conflict, veto.

Pendahuluan

Krisis yang terjadi di negara Suriah merupakan krisis nasional yang disebabkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh para oposisi yang menentang pemerintah presiden Bashar al-Assad dan menuntutnya untuk turun dari kursi pemerintahan Suriah. Bashar al-Assad dianggap sebagai pemimpin yang diktator dan tidak transparan sehingga banyak dari para demonstran yang menuntut untuk diadakannya pembentukan pemerintahan baru melalui pemilu yang demokratis. Guna menghadapi gelombang demonstran yang besar, Bashar al-Assad kerap menggunakan militer dan pasukan bersenjata sehingga timbul banyaknya korban

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Angkatan 2009.

² Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

jiwa. Melihat fenomena tersebut, PBB sebagai badan arbitrase internasional mengeluarkan resolusi untuk membantu Suriah dalam mengatasi konflik internalnya. Rusia sebagai pemilik hak veto³ menolak keputusan tersebut, sehingga masalah penyelesaian konflik Suriah tak kunjung selesai dan menjadi sebuah masalah.

Konflik Suriah pada awalnya merupakan kekerasan internal dengan di tandainya demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011 yang berkembang menjadi pemberontakan nasional.⁴ Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Rakyat menuntut keadilan politik yang selama ini dikuasai oleh partai Ba'ath dan persamaan hak khususnya bagi suku kurdi.⁵ Aksi protes tersebut menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat, dan juga pemberhentian Undang-Undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963-2011. Sejak diberlakukannya Undang Undang tersebut, pemilihan presiden dilakukan melalui referendum, dan tidak lagi melalui pemilihan umum. Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Bashar al-Assad, namun itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan pengunduran rezim Bashar al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis.

Aksi-aksi demo pun mulai bermunculan di Suriah, rakyat Suriah mulai menyuarakan tuntutan mereka untuk menghentikan rezim Bashar al-Assad. Pada 6 Maret 2011, majalah *Time* menyarankan secara implisit untuk eskalasi gerakan revolusi dalam artikelnya yang berjudul "*The Youth of Syria : The Rebels Are on Pause*".⁶ Pada 25 Maret 2011, sekitar 100.000 orang berpawai di kota Daraa, dan 20 orang demonstran terbunuh pada pawai itu. Bentrokan antara demonstran dan tentara Suriah pun semakin sering terjadi. Pemerintah Suriah pun tak segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk merepresi rakyat dan membungkam gerakan protes tersebut. Aksi represi ini dulu merupakan cara yang efektif untuk membungkam rakyat Suriah. Namun kini hal ini hanya memicu terjadinya demonstrasi-demonstrasi lain yang lebih dahsyat. Bahkan sejak 6 Maret 2012 dan menurut data PBB, 5.000 orang tewas di negara ini selama sembilan bulan terakhir.⁷

Dewan Keamanan mengancam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi. Dewan Keamanan sendiri telah melakukan pertemuan yang membahas masalah ini. Selain Dewan Keamanan, Liga Arab juga berinisiatif untuk menghentikan krisis di Suriah dengan mengeluarkan resolusi yang mencerminkan kecaman terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh rezim Al-Assad pada rakyatnya.⁸ Tindakan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik di Suriah selalu mengalami konflik internal, terutama pada anggota tetapnya. Jalan buntu sering ditemui pada perundingan, dan bila resolusi akan dikeluarkan (rencana resolusi terakhir soal

³ Lima anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB memiliki hak istimewanya yang disebut hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak ini tidak dimiliki oleh satupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

⁴ "PBB sahkan Syria di kancah perang saudara", *Sinar Harian*, 13 Jun 2012. Diakses pada 8 Mei 2013

⁵ "Syrian Protests Add to Pressure on Assad Regime", *The Wall Street Journal*, 23 Mac 2011. Diakses pada 7 Maret 2013.

⁶ R. Abouzeid, 'The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause', *Time World(online)*, 2012, <<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.html>>, diakses pada 20 Maret 2013.

⁷ The Global Review, *Ribuan Warga Suriah Dukung Presiden Assad*, diakses dari <www.theglobal-review.com>, pada [17 Oktober 2012]

⁸ Antaranews, 'Dewan Keamanan PBB Kecam Penindasan Suriah', *Antaranews(online)*, 2012, <<http://www.antaranews.com/berita/270111/dewan-keamanan-pbb-kecam-penindasan-suriah>>, diakses 17 Maret 2013.

dukungan penuh terhadap Liga Arab)⁹ selalu ada bayangan veto. Walaupun dibayangkan oleh veto dari resolusi yang dicanangkan oleh Dewan Keamanan PBB, dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012 merupakan salah satu bentuk dukungan dari upaya penyelesaian konflik yang dicanangkan oleh Liga Arab mengenai penggabungan pasukan pemelihara perdamaian Arab-PBB.¹⁰ Resolusi yang mengarah kepada upaya perdamaian ini berisikan tentang tuntutan pemerintahan Suriah agar segera memberhentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa setiap harinya akibat kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil Suriah. Selain itu, dalam resolusi ini juga diupayakan agar pemerintah Suriah mau membuka dialog politik yang memungkinkan tentang hak-hak warganya untuk mengekspresikan pendapat dibalik kebijakan otoriter yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan Suriah.¹¹ Tindaklanjut mengenai penggantian kepemimpinan presiden Bashar al-Assad yang sudah berkuasa selama 11 tahun dan upaya atas pembebasan tahanan yang telah menyerukan reformasi di Suriah juga merupakan salah satu bagian dari isi resolusi yang dicanangkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Kebijakan Rusia mengeluarkan hak veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang konflik sipil di Suriah dapat dikaji dengan menggunakan teori politik luar negeri dengan model aktor rasional. Politik luar negeri dalam model aktor rasional dianggap sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Negara adalah sebuah institusi yang dilegitimasi oleh rakyatnya, karena negara mewakili rakyatnya, baik di dalam negara itu sendiri maupun di kancah internasional. Oleh karena itu, dalam model ini negara dianggap sebagai pembuat keputusan yang rasional. Negara dapat diibaratkan sebagai individu, yang akan membuat perhitungan untuk sebuah keputusan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kerasionalitasan suatu negara dalam membuat keputusan dan kebijakan dapat terjadi ketika negara tersebut akan memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada.¹² Oleh karena itu, negara membutuhkan informasi-informasi yang terbaik. Jika hal ini tidak terpenuhi, negara tidak dapat memilih alternatif yang terbaik untuk kebijakan luar negerinya.

Teori politik luar negeri dengan model aktor rasional diperkenalkan oleh Graham T. Allison yang berasumsi bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik internasional.¹³ Perspektif ini lebih memfokuskan perhatiannya pada transaksi dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu peristiwa daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan.¹⁴ Dalam model aktor rasional, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.¹⁵

Model aktor rasional juga merupakan aspek terpenting dari porses pengambil kebijakan. Paul Macdonald mengemukakan bahwa aktor rasioanl merupakan hal terpenting

⁹ Vivanews, 'Rusia Siap Veto Resolusi PBB Soal Suriah', *Vivanews(online)*, 2012, <<http://dunia.vivanews.com/news/read/284999-rusia-siap-veto-resolusi-pbb-soal-suriah>>, diakses 17 Maret 2013.

¹⁰ Metrotvnews, 'Suriah Tolak Resolusi Liga Arab', *Metrotvnews(online)*, 2012, <<http://metrotvnews.com/read/news/2012/02/13/81779/Suriah-Tolak-Resolusi-Liga-Arab/7>>, diakses 19 Maret 2012.

¹¹Security Council, 'Security Council fails to adopt draft resolution condemning Syria's crackdown on anti-government protestors, owing to veto by Russian Federation, China', *United Nations (online)*, 2012, <<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm>>, diakses 20 Maret 2012.

¹² Morton Halperin, *Bureaucratic Politics: A paradigm and Some Policy Implication*, World Politics, vol .24

¹³ Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New jersey, prentice hall, Inc., Englewood cliff, hal.5

¹⁴*Ibid*, hal. 6

¹⁵ John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. Chapter 3

dalam proses pengambilan kebijakan yang tak terlepas dari perilaku sosial dan politik sehingga model ini bersifat universal.¹⁶ Graham Allison mendefinisikan model aktor rasional sebagai sebuah "konsisten dalam memaksimalkan nilai pilihan dalam batasan tertentu".¹⁷ Menurut Allison pengambil keputusan rasional memilih alternatif yang menyediakan konsekuensi yang paling disukai.

Dalam membuat keputusan, aktor rasional mempunyai beberapa pertimbangan dalam prosesnya mengambil suatu kebijakan. Hal tersebut digambarkan bahwa seorang aktor memiliki Harapan utilitas atau juga dikenal dengan istilah teori *expected utility theory (EUT)* dalam pengambilan keputusan.¹⁸ Dalam teori EUT, asumsi dari pengambilan keputusan dimaksimalkan oleh Utilitas dengan mengambil keputusan dengan resiko tertinggi, dengan demikian setiap peluang akan dimaksimalkan. Selain itu, model dari EUT ini juga mengenal adanya kemungkinan alternatif lain dalam pengambilan keputusan tersebut, dan alternatif dengan jumlah kemungkinan tertinggillah yang dipilih untuk memaksimalkan utilitas tersebut.¹⁹ Selain itu, bahwa Peluang biaya sangat penting bagi seorang aktor rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor biaya sangat penting karena biaya akan terkait dengan penggunaan materi.

Pembahasan

Krisis kepemimpinan dan konflik sipil di Suriah

Suriah merupakan negara di wilayah Syam yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Yordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di Barat dan Irak di Timur. Karenanya secara geografis dapat dikatakan bahwa Suriah adalah penghubung antara dua Benua, Asia dan Afrika. Letak yang strategis tersebut menjadikan Suriah sebagai wilayah yang diperebutkan berbagai unsur kekuatan global. Total wilayah Suriah adalah 185.180 km persegi dengan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun. Ibukota negara Suriah adalah Damaskus, dengan sistem pemerintahan Republik. Mayoritas suku di suriah adalah Arab dengan persentase 90,3% dan sisanya suku Rurdi, Armenia dan lain-lain dengan persentase 9,7%.²⁰ Di negara Suriah, menjadi hal yang tabu bagi rakyat Suriah untuk mendirikan partai politik dan menyuarakan pendapat yang bersebrangan dengan elite partai Ba'ath yang didominasi oleh kaum minoritas Alawiyah. Eksistensi Partai Baath yang sekuler dan represinya kepada pihak oposisi. Presiden Bashar al Assad melarang semua bentuk oposisi dan melakukan pembatasan kebebasan bersuara terhadap mereka yang menentanginya di satu sisi pihak oposisi menuntut dibukanya kebebasan berpendapat dan ditegakkannya demokrasi di pemerintahan Suriah. Akibatnya, pemerintahan Suriah sering dilanda krisis politik yang mengakibatkan pecahnya kudeta atas pemerintahan. Masalah lain dari timbulnya konflik di Suriah adalah adanya isu sektarian. Sekte Syiah yang menjadi kelompok minoritas menguasai pemerintah dan mendominasi sekte Sunni sebagai kelompok mayoritas di Suriah. Bahkan Sejak tahun 1963 sampai tahun 2011 negara yang berbatasan dengan Libanon, Turki, Irak, Yordania dan Israel tersebut memberlakukan undang-undang darurat untuk mengantisipasi timbulnya gejolak politik.

¹⁶ Paul MacDonald. 2003. "Useful Fiction or Miracle Maker: The Competing Epistemological Foundations of Rational Choice Theory." *American Political Science Review* 97(4): hlm. 551–565.

¹⁷ Graham Allison. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown. Hlm. 30

¹⁸ Alex Mintz & Karl DeRouen Jr. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University. Hlm 61

¹⁹ Zeev Maoz. 1990. *National Choices and International Processes*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 167

²⁰ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>

Konflik sipil di Suriah disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar seperti faktor politik, sosial dan ekonomi. Dari segi politik, krisis kepemimpinan yang terjadi Suriah dikarenakan sikap otoriter Presiden Hafez Al Assad dan putranya Bashar Al Assad. Rezim Assad telah menciptakan suatu diskriminasi dan tidak adanya sebuah kebebasan dan independensi berbicara bagi warga Suriah.²¹ Dari segi ekonomi, kemiskinan selalu menjadi sebuah masalah bagi pemerintahan Assad. Pemerintahan Assad terbukti bahwa Assad tidak mampu mengatasi kemiskinan yang sudah lama melanda Suriah. Dari segi sosial, adanya kesenjangan sosial, dimana kaum minoritas di Suriah lebih berkuasa sehingga menimbulkan berbagai demonstrasi. Politik dan pemerintahan Suriah sejak tahun 1971 sampai tahun 2000 dipegang oleh Hafez al-Asad, Ayah presiden Suriah saat ini, Bashar Al-Asad, sedangkan pada tahun 2000 sampai sekarang Suriah dipimpin oleh Bashar Al-Asad. Sepanjang masa itulah dapat dikatakan Suriah mengalami krisis pemerintahan yang terus berlanjut hingga sekarang. Setelah revolusi Suriah pada tahun 1970, presiden Hafez Al-Assad memimpin Suriah, dengan berbagai kebijakan kontroversialnya. Selama 30 tahun memimpin, Hafez Al-Assad telah mengharamkan pihak lawan politik untuk bersaing dalam pemilihan presiden Suriah. Hafez Al-Assad pun dengan kejam membantai dan membunuh masyarakat Suriah yang mencoba menurunkannya dari pemerintahan Suriah. Pergantian pemerintahan kepada anaknya Bashar Al-Assad pun tidak membawa pengaruh positif karena Bashar Al-Assad cenderung mengikuti jejak ayahnya yang otoriter. Banyak tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Bashar Al Assad, seperti misalnya tidak adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Hal tersebut tentu menyebabkan sebuah hambatan bagi warga negara Suriah yang ingin berpartisipasi dalam politik di Suriah. Masalah lain seperti ekonomi dan sosial juga kerap terjadi di Suriah.

Hubungan dan kepentingan politik keamanan Rusia di Suriah

Setelah Uni Soviet runtuh dan digantikan oleh Rusia, hubungan yang telah dimulai dari Uni Soviet dilanjutkan oleh Rusia. Rusia merupakan negara utama pewaris kejayaan masa lalu Uni Soviet yang memiliki sejarah panjang benturan-benturan kepentingan politik dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa. Hubungan diplomatik Suriah dan Rusia diperkuat pula dengan fakta sejarah yang hingga saat ini masih berlangsung diantara kedua negara, yakni pangkalan Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartus yang sudah ada sejak masa Uni Soviet. Uni Soviet (sebelum bubar menjadi Rusia) adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Hubungan Uni Soviet-Suriah semakin kuat setelah Presiden Hafez Assad, ayah Presiden Suriah sekarang, memegang kekuasaan di Damaskus pada tahun 1970.²² Peralatan militer Uni Soviet semakin mengalir banyak ke Suriah saat itu. Uni Soviet juga menjadi jaminan bagi dukungan politik Suriah di pentas internasional. Hafez al-Assad telah menandatangani perjanjian pakta pertahanan keamanan dengan Rusia.²³ Selama era itu, Moskow mengirimkan senjata senilai 135 juta dolar AS ke Damaskus. Pada tahun 1980, Assad dan Presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev bahkan menandatangani pakta kerja sama lanjutan selama dua puluh tahun terakhir.²⁴ Khusus pada bidang militer, Uni Soviet juga

²¹ R. Abouzeid, 2012 'The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause', *Time World(online)*, <<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.html>>, [diakses 20 Maret 2013.]

²² Egidius Patnistik. 2012. Hubungan Rusia Suriah amat strategis <<http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriah.Amat.Strategis>> [diakses 11 oktober 2013]

²³ Bantarto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk : Dimensi Internal Dan Eksternal*, Jakarta CSIS, 1991, hal. 8

²⁴ Muhammad Ibrahim Hamdani. 2013. <<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/49759/m-ibrahim-hamdani-krisis-politik-suriah-dalam-tinjauan-geopolitik-rusia>> [diakses 3 oktober 2013]

sangat percaya terhadap Suriah sehingga berani meletakkan pasukan militernya besar-besaran di Suriah. Pada pertengahan 1984, diperkirakan ada 13.000 tentara dan petinggi Uni Soviet di Suriah. Namun, hubungan kedua negara sempat merenggang dikarenakan terjadinya beberapa sengketa diantara kedua negara pada tahun 1985 membuat pasukan dan penasehat Uni Soviet ditarik dari Suriah. Hingga tahun 1986 tercatat sekitar 2000 pasukan dan penasehat Uni Soviet ditarik dari Suriah, dan 5000 diantaranya tetap berada di Suriah.²⁵ Pangkalan militer Uni Soviet yang dibangun sejak tahun 1963 di pelabuhan Tartus Suriah adalah salah satu bentuk kerjasama nyata tersebut. Pangkalan militer di Tartus tidak sebesar pangkalan militer lainnya, namun nilai strategis karena terletak di lautan Mediterania menjadikan pangkalan militer ini sangat berharga bagi Uni Soviet. Pangkalan militer Uni Soviet tersebut menjadi alasan kerjasama Uni Soviet di bidang militer maupun ekonomi. Suriah memiliki nilai strategis secara militer dan politik maupun ekonomi. Suriah adalah pasar senjata Uni Soviet terbesar di Timur Tengah. Hampir semua peralatan militer Suriah adalah buatan Uni Soviet.

Diplomasi Rusia di Dewan Keamanan PBB terkait konflik sipil di Suriah

Pada tanggal 3 Agustus 2011 para duta besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati sebuah pernyataan untuk mengutuk kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap para demonstran anti-pemerintah. Namun, pernyataan tersebut juga menyerukan kepada pihak yang melakukan aksi protes pada pemerintah untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap institusi negara. Menurut para diplomat yang terlibat dalam pembahasan tentang Suriah di Dewan Keamanan PBB, rancangan pernyataan tersebut secara prinsip telah disetujui oleh semua anggota dan tinggal menunggu persetujuan akhir sebelum akan dibacakan sebagai pernyataan resmi Dewan Keamanan PBB pada hari yang sama. Dalam rancangan pernyataan tersebut disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB mengutuk meluasnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan (militer) terhadap rakyat sipil oleh pihak-pihak berwajib Suriah.²⁶

Pernyataan itu juga mendesak Suriah untuk menghormati hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Dewan Keamanan PBB juga menyayangkan langkah pemerintah Presiden Bashar al-Assad yang dipandang kurang berkomitmen untuk melaksanakan janji reformasi yang pernah disampaikan kepada rakyat Suriah. Namun, rancangan resolusi itu juga menyerukan “penghentian segala bentuk kekerasan dan mendesak semua pihak untuk saling menahan diri, mencegah tindak balas dendam, termasuk penyerangan terhadap institusi-institusi negara.”²⁷ Kalimat terakhir tersebut merupakan bentuk kompromi dengan keinginan Rusia, Cina, dan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, yang menuntut keseimbangan dalam pernyataan tersebut dan menyalahkan pihak pemerintah maupun demonstran atas pecahnya kekerasan dalam gelombang protes anti-pemerintahan yang telah berlangsung lima bulan. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman, sudah berbulan-bulan mengusulkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindak kekerasan Presiden al-Assad, tetapi ditentang oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), yang kebetulan semua menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tahun 2011. Negara-negara tersebut kecewa dan marah terhadap negara-negara Barat, yang mereka

²⁵ *U.S. Library of Congress Relations with the Soviet Union* <http://countrystudies.us/syria/68.html>

²⁶ Rizki Gunawan dan Vincent Hakim, “Api Kekerasan di Suriah, Sampai Kapan?”, <[http://berita.liputan6.com/read/393834/api-kekerasan-disuriah-sampai-kepan/](http://berita.liputan6.com/read/393834/api-kekerasan-disuriah-sampai-kepan)>[diakses tanggal 23Agustus 2012]

²⁷ *ibid*

anggap telah menyalahgunakan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Libya untuk melancarkan operasi militer yang berlarut-larut hingga saat ini. Rusia dan Cina yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bahkan terang-terangan mengancam akan memveto setiap rencana resolusi menentang Suriah.

Berbagai upaya yang dilakukan Rusia untuk mendukung pemerintahan Assad, seiring meningkatnya tekanan negara-negara Barat terhadap Suriah. Pemerintah Rusia telah mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Mediterania untuk menggelar latihan militer dan mendemonstrasikan kekuatan sebagai bentuk dukungan simbolis Rusia untuk Suriah. Pengerahan dua kapal perang Rusia ke Pelabuhan Tartus, pangkalan militer negara itu di Suriah dan pengiriman enam kapal perang ke Laut Mediterania dapat ditafsirkan sebagai dukungan simbolis Rusia untuk Suriah. Misi kapal-kapal perang Rusia dilaporkan akan berlangsung selama tiga bulan di kawasan tersebut.²⁸ Dari sisi lain, militer Suriah juga menggelar manuver militer bersama dengan kerjasama angkatan darat, udara, dan laut.²⁹ Latihan yang digelar bersamaan dengan bersandarnya kapal perang Rusia di Pelabuhan Tartus bukan tanpa hubungan. Rusia dan Suriah sepertinya ingin mengirim sinyal peringatan kepada Barat dengan menampilkan kekuatan militer dan strateginya di perairan dekat Suriah. Pemerintah Suriah ingin menyampaikan pesan kepada Barat bahwa mereka akan mereaksi keras atas setiap intervensi dan pelanggaran wilayah teritorial Suriah. Rusia juga ingin menyatakan bahwa negara itu siap merespon segala bentuk ancaman yang membahayakan kepentingannya di kawasan dan akan membela kepentingannya di Suriah.

Rusia sepertinya tidak ingin lagi terjadi sebagaimana di Libya dan tidak akan membiarkan Barat memutuskan nasib kawasan sesuka hati. Sejauh ini, Rusia telah mengambil langkah-langkah politik dan keamanan untuk menghadapi perang yang dikobarkan Barat di Suriah. Para pejabat Rusia senantiasa menegaskan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata ilegal dan penghentian bantuan persenjataan asing kepada mereka. Rusia juga mendukung proses reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Presiden Vladimir Putin dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa seluruh upaya harus dikerahkan sehingga pihak-pihak yang bertikai di Suriah bersedia menerima dialog. Putin juga menegaskan perlunya mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk menemukan sebuah solusi politik damai.³⁰ Sejak pertama kali pecahnya konflik sipil di Suriah, Rusia menuntut penyelesaian diplomatik melalui perundingan di antara berbagai kelompok di Suriah. Mereka juga meminta komitmen Barat terhadap prakarsa Kofi Annan dan Komunike Jenewa untuk mengakhiri krisis berkepanjangan di negara itu.

Rusia menyerukan Amerika Serikat untuk bekerja lebih aktif baik dengan pejabat pemerintah dan oposisi. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Michael McFaul pada 13 Juli 2012, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov menekankan bahwa Rusia terus bekerja dengan Suriah dan berbagai kelompok oposisi Suriah dalam upaya untuk mengakhiri krisis. Pihak Rusia mengungkapkan harapan bahwa Amerika Serikat akan bertindak dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, Rusia menegaskan akan memveto rancangan resolusi PBB yang menyerukan sanksi lebih terhadap Suriah. Wakil Duta Besar

²⁸ The Global Review, "Dukungan Simbolis Rusia terhadap Suriah", diakses dari <www.theglobal-review.com>,[diakses pada 19 Oktober 2012]

²⁹ Khairisa Ferida, "Rusia Pasang Badan untuk Suriah" <<http://international.okezone.com/read/2012/08/16/412/678782/rusia-pasang-badan-untuk-suriah>>[diakses pada 19 Oktober 2012]

³⁰ United Nation,2012. "Syria: Ban voice deep regret after Security Council fails to agree on resolution"<<http://www.un.org/apps/news/story.asp/www.iaea.org/story.asp?NewsID=41144&Cr=Syria&Cr1=#.UsDa3leKXZ8>>[diakses pada 3 Juni 2013]

Rusia di PBB Igor Pankin mengatakan, "Apa pun bisa dinegosiasikan, tapi kami tidak akan merundingkan masalah sanksi. Ini adalah garis merah Rusia."³¹

Pada tanggal 4 Oktober 2011 Dewan Keamanan PBB melakukan sidang pertamanya terkait konflik sipil Suriah di New York yang diikuti oleh 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.³² Dalam sidang tersebut, Dewan Keamanan PBB membahas mengenai rancangan resolusi yang isinya mendukung adanya intervensi militer terhadap pemerintah Suriah, karena pemerintahan Assad dinilai telah banyak sekali melakukan berbagai pelanggaran HAM dengan menggunakan kekuatannya untuk melawan rakyat sipil. Hasil sidang Dewan Keamanan PBB tersebut adalah Rusia dan Cina sebagai anggota Dewan tetap menolak/menveto keputusan tersebut, 9 suara setuju dengan 4 abstain yaitu Brasil, India, Lebanon, Afrika Selatan. Artinya rancangan resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Rusia dan Cina merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan hak vetonya. Alasan Rusia dan Cina menolak rancangan resolusi tersebut karena upaya pengeluaran resolusi tersebut akan membuka peluang pelanggaran kedaulatan Suriah oleh kekuatan asing.³³

Rancangan resolusi yang tidak juga menemui titik temu akibat adanya veto dari Rusia dan Cina menginisiatif Liga Arab untuk turut memberikan rancangan resolusi. Resolusi Liga Arab tersebut berisi tentang seruan transisi politik Suriah yang harus masuk kedalam sistem yang lebih demokratis. Liga Arab juga menyerukan kepada pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Resolusi Liga Arab langsung didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mencerminkan kecaman terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh rezim Assad pada rakyatnya. Kecaman mereka beralasan bahwa Suriah melakukan kekerasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepada penduduk sipil.³⁴ Di sisi lain, teks kecaman Dewan Keamanan menyoroti otoritas Suriah untuk menghormati hak asasi manusia dan tunduk pada hukum internasional.

Menindaklanjuti usulan resolusi Liga Arab mengenai konflik Suriah, pada tanggal 4 Februari 2012 Dewan Keamanan PBB melaksanakan sidang kedua untuk membahas mengenai resolusi baru yang mungkin nantinya akan disetujui oleh Rusia. Langkah tersebut juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari upaya penyelesaian konflik yang dicanangkan oleh Liga Arab mengenai penggabungan pasukan pemelihara perdamaian Arab-PBB.³⁵ Resolusi yang mengarah kepada upaya perdamaian ini berisikan tentang tuntutan pemerintahan Suriah agar segera memberhentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa setiap harinya akibat kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil Suriah.

Rusia kembali memveto rancangan resolusi tersebut. Menurut Rusia, rancangan baru tidaklah seimbang karena melibatkan banyak pihak.³⁶ Selain itu, intervensi militer tersebut dianggap Rusia melanggar piagam PBB yang mengatakan bahwa suatu negara tidak boleh ikut campur terhadap masalah internal negara lain. Rusia juga mempertanyakan mengapa

³¹ *ibid*

³² United Nation News. 4 Oktober 2011. "Russia and China veto rancangan Security Council resolution on Syria" <<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm>>[diakses pada 3 Agustus 2013]

³³ Guardian, *loc.cit*.

³⁴ BBCNews, 19 Maret 2012, "PBB-Suriah Teken Kesepakatan Awal", <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120419_syria_un.shtml>[diakses 3 Agustus 2013]

³⁵ Suriah Tolak Resolusi Liga Arab, *loc.cit*.

³⁶ PBB, 2012. "Security Council Fails to Adopt Rancangan Resolution Condemning Syria's" <<http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm>> [diakses tanggal 1 Agustus 2013]

dalam amandemen resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru usulan dari Rusia tidak disertakan. Selain itu, keputusan untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah dianggap Rusia akan menambah krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Libya dan juga Irak. Atas alasan dan ketidakpuasan tersebutlah Rusia kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap konflik di Suriah untuk kedua kalinya. Bahkan Rusia lebih memilih menggelar pertemuan dengan pihak Suriah di Moskow pada 7 Februari 2012 guna membahas penyelesaian konflik dengan cara yang lebih diplomatis tanpa melibatkan pihak asing.³⁷

Simpulan

Kebijakan Rusia mengeluarkan hak veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang konflik sipil di Suriah adalah karena Rusia memiliki kepentingan politik dan keamanan terhadap Suriah. Kesimpulan tersebut mengacu pada tindakan Rusia yang dua kali menolak resolusi yang dicanangkan oleh Dewan Keamanan PBB pertama pada tahun 2011 dan 2012. Tindakan Rusia tersebut tentu saja mengindikasikan adanya kepentingan Rusia terhadap Suriah, sehingga Rusia berani memveto keputusan Dewan Keamanan PBB dalam rencananya melakukan intervensi terhadap Suriah terkait konflik sipil yang terjadi di Suriah dan telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan berbagai pelanggaran HAM. Dukungan Rusia terhadap rezim Bashar al Assad juga telah menimbulkan reaksi negatif dari dunia internasional khususnya negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Liga Arab, karena Rusia dianggap mendukung berlangsungnya konflik sipil di Suriah demi kepentingan Rusia sendiri.

Konflik sipil di Suriah disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar seperti faktor politik, sosial dan ekonomi. Dari segi politik, krisis kepemimpinan yang terjadi Suriah dikarenakan sikap otoriter Presiden Hafez Al Assad dan putranya Bashar Al Assad. Rezim Assad telah menciptakan suatu diskriminasi dan tidak adanya sebuah kebebasan dan independensi berbicara bagi warga Suriah. Dari segi ekonomi, kemiskinan selalu menjadi sebuah masalah bagi pemerintahan Assad. Pemerintahan Assad terbukti bahwa Assad tidak mampu mengatasi kemiskinan yang sudah lama melanda Suriah yang dapat dilihat dari segi sosial dengan adanya kesenjangan sosial, dimana kaum minoritas di Suriah lebih berkuasa sehingga menimbulkan berbagai demonstrasi. Bashar al Assad menggantikan ayahnya sebagai Presiden Suriah segera setelah kematiannya pada 10 Juni 2000. Assad merupakan seorang muslim Syiah yang merupakan kaum minoritas di Suriah. Dalam pemerintahannya Assad didukung oleh pemerintah Cina dan Rusia, karena Assad menganut idealisme sosialis komunis. Kebebasan dan tidak transparannya serta tidak demokratisnya pemerintahan Bashar al Assad membuat Bashar dianggap sebagai pemimpin yang otoriter. Bashar al Assad tidak pernah mau mendengarkan tuntutan warga Suriah, akibatnya sering terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bashar al Assad untuk mundur dari jabatan presiden Suriah dan mengamendemen Undang-Undang negara Suriah serta melaksanakan pemilu yang lebih demokratis. Para demonstran dan kaum oposisi juga menuntut mundur Bashar al-Assad dan meminta diakhirinya era partai Baath yang telah memerintah selama lima dekade. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi konflik berdarah ketika Bashar al-Assad memerintah tentara Suriah melawan demonstrasi yang meluas ke seluruh negara dengan tembakan peluru hingga menimbulkan banyaknya korban jiwa.

Pengaruh Rusia terhadap Suriah juga merupakan salah satu faktor penyebab konflik sipil di Suriah terjadi hingga saat ini. Rusia juga merupakan negara yang sangat mendukung kebijakan dan rezim Bashar al Assad. Hubungan baik antara Rusia dengan Suriah dimulai

³⁷ Gorenburg, *op.cit.*, hlm:5

dari hal tersebut dibuktikan dengan ditanda tangannya *Treaty of Friendship Cooperation* yang berisi kesepakatan kerjasama dalam jual beli peralatan perang mutakhir bagi keperluan angkatan bersenjata Suriah oleh Uni Soviet pada tahun 1972. Pada dasarnya Rusia lebih menekankan kepada hubungan dan kepentingan politik keamanan terhadap Suriah. Rusia yang selama ini dikenal sebagai negara yang sumber perekonomiannya diperoleh dari penjualan senjata tentu tidak mau kehilangan pasarnya yaitu Suriah, untuk itu Rusia selalu berupaya menanamkan pengaruhnya terhadap Suriah. Artinya kedekatan Rusia dengan Suriah adalah karena mereka memiliki kerja sama dibidang ekonomi dan ideologi. Secara ekonomi Rusia adalah penyokong persenjataan militer terbesar untuk Suriah dan Rusia memiliki angkatan laut di pelabuhan Suriah yang memberikan akses langsung militer Rusia menuju laut Mediterania. Secara ideologi, tujuan utama Rusia adalah menghalangi upaya Amerika untuk menyebarkan ideologinya. Rusia tidak mempercayai apabila tindakan revolusi, perang dan perubahan rezim kepemimpinan dapat memberikan kestabilan dalam demokrasi.

Empat alasan mengapa Rusia mendukung secara totalitas kebijakan Bashar al Assad ditengah konflik yang sedang terjadi di Suriah yaitu, pertama Rusia memiliki instalasi angkatan laut di Suriah, yang memiliki peran strategis dan merupakan pangkalan militer terakhir Rusia di luar bekas Uni Soviet. Kedua, Rusia masih memiliki mentalitas Perang Dingin, serta perasaan tidak aman secara nasional, yang membuatnya menjadi sangat protektif menjaga aliansi militernya dengan Suriah. Ketiga, Rusia juga menolak gagasan “intervensi asing” terhadap negara-negara seperti Suriah karena melihat ini sebagai bagian dari Perang Dingin dan merupakan gaya imperialisme Barat yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi Rusia. Keempat, Suriah membeli banyak peralatan militer Rusia, dan tentu saja Rusia membutuhkan uang. Suriah adalah pasar senjata Rusia terbesar di Timur Tengah. Banyaknya korban jiwa akibat perang sipil yang terjadi di Suriah membuat Dewan Keamanan PBB mengutuk penggunaan militer terhadap rakyat sipil oleh pihak-pihak berwajib Suriah. Hal tersebut membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada tahun yang isinya mengusulkan untuk dilakukan intervensi kepada negara Suriah atas tindakan presiden Suriah Bashar al Assad yang telah menyebabkan timbulnya konflik sipil di Suriah. Pada tanggal 4 oktober 2011, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang pertamanya terkait konflik sipil di Suriah. Rancangan tersebut ditolak oleh Rusia, karena Rusia menganggap intervensi terhadap Suriah hanya akan menambah masalah dan tidak berujung pada penyelesaian konflik. Artinya resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak suara penuh.

Liga Arab menginisiatif terbentuknya rancangan resolusi baru mengenai penyelesaian konflik di Suriah, dan Dewan keamanan PBB merespon usulan tersebut dan melaksanakan sidang kedua pada 4 februari 2012. Resolusi yang mengarah kepada upaya perdamaian ini berisikan tentang tuntutan pemerintahan Suriah agar segera memberhentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa setiap harinya akibat kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil Suriah. Rusia kembali menveto rancangan Dewan Keamanan PBB tersebut dengan alasan intervensi militer terhadap Suriah dianggap Rusia hanya akan menambah krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Libya. Dua kali veto Rusia terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa pada dasarnya Rusia memiliki kepentingan, yaitu kepentingan politik dan keamanan terhadap Suriah.

Daftar Pustaka

- Abouzeid,R. 2012 ‘The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause’, *Time World online*[internet]1 juni tersedia di: <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.htm>. [diakses 12 september 2012]
- AFP. 2012. Foreign militants fighting in Syria battlefields. *tribune.com* [internet] 7 Maret.tersedia: <http://tribune.com.pk/story/346709/foreign-militants-fighting-in-syria-battlefields> [diakses pada 25 September 2012]
- al-Rasheed, Madawi 2012. Saudi arabia and Syria: logic of dictators. *Opendemocracy.net* [internet] 3 maret. Tersedia di : <http://www.opendemocracy.net/madawi-al-rasheed/saudi-arabia-and-syria-logic-of-dictators>. [diakses pada 18 juni]
- Bantarto, Bandoro.1991. *Timur Tengah Pasca Perang Teluk : Dimensi Internal Dan Eksternal*, Jakarta: CSIS
- BBC News Middle East. 2012. Syria unrest: Who are the shabiha?. *bbc.co.uk* [internet] 3 mei. Tersedia di : <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14482968> [diakses pada maret 2012]
- Blomfield, Adrian. 2012. “Syria: Rusia to Send Marines to Naval Base,”. *The Telegraph*,[internet] 18 juni. Tersedia di: <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9339905/Syria-Rusia-to-send-marines-to-naval-base.html>>[diakses pada 25 agustus 2013]
- Borisov, Sergey. 2006“Russia and Israel to join forces in anti-terrorost cooperation,” Pravda,7Sept2004 in Ilya Bourtman, *Putin and Russia’s Middle Eastern Policy*, Middle East Review of International Affairs, Vol.10, No.2. hlm.1
- Buzan, Barry Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework of Analysis*. London : Lynne Rienner Publisher
- Charbonneau, Louis. 2012. “Rusian arms shipment en route to Syria,”. *Reuters*, [internet] 25 mei. Tersedia di: <<http://www.reuters.com/article/2012/05/25/us-syria-armsRusia-idUSBRE84O12F20120525>>[diakses pada 15 agustus 2013]
- Committeri, Camilla 2012. “When Domestic Factors Prevail Upon Foreign Ambitions: Russia’s Strategic Game in Syria”. **IAI Working Papers** vol 12. hlm:5.
- Dmitri Trenin., 2013. “The Carnegie Papers: The Mythical Alliance.” *Russia’s Syria Policy* vol 6. hlm.13
- Egidius, Patnistik. 2012. Hubungan Rusia Suriah amat strategis. *kompas.com* [internet] 13 februari. Tersedia

di:<http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia-Suriah.Amat.Strategis> [diakses 11 oktober 2013]

Eyal, Zisser. 2000. *Assad's Legacy—Syria in Transition*. New York: New York University Press

Gardner, Frank. 2012. How vital is Syria's Tartus port to Russia?. *bbc.co.uk* [internet] 9 februari 2013. Tersedia di: <<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18616191>>[diakses pada 12 maret 2013]

Ghafur, Muhammad Fakhry. 2012. Membaca konflik suriah. *Politik.lipi.go.id*, [internet] 1 juli. tersedia di : <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/timur-tengah/669-membaca-konflik-suriah.html> [diakses 15 november 2012]

Hafez, Salam. 2011. Syrian Opposition Call For No-Fly Zone. *turkishweekly.net* [internet] 8 Oktober. Tersedia di: <http://www.turkishweekly.net/news/124717/syrian-opposition-call-for-no-fly-zone.html> [diakses pada 8 April 2012]

Hardoko, Evan. 2013. Rusia tegaskan tetap kirim rudal S 300 ke suriah. *kompas.com* [internet] 22 juli. Tersedia di: <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/22/1650099/Rusia.Tegaskan.Tetap.Kirim.Rudal.S-300.ke.Suriah> [diakses 8 agustus 2013]

Harel, Amos. 2012. Iran, Hezbollah significantly increase aid to Syria's Assad. *haaretz.com*, [internet] 6 April. Tersedia di: <http://www.haaretz.com/news/middle-east/iran-hezbollah-significantly-increase-aid-to-syria-s-assad-1.422954> [diakses pada 8 desember]

Human Right Watch. 2010. Human Right Watch, World Report. *hrw.org*, [internet] 2 februari. Tersedia di : <http://www.hrw.org/world-report-2010> [diakses pada 15 Juni 2012]

Irdayanti, *Kebijakan Rusia Menolak Strategi Barat Di Suriah*, Jurnal Transnasional vol. 4, no. 1, Juli 2012

Ismail, Faisal. 2013. Assad di tengah gempuran oposisi. *sindonews.com*, [internet] 3 januari. Tersedia di: <http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/01/18/722842/assad-di-tengah-gempuran-oposisi> [diakses pada 5 maret]

Jacobson, Harold. 1979. *Networks of Interdependence; Internasional Organizations and the Global Political System, The Range of Functions*. New York: Alfred A. Knopf

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Graha Ilmu.

Kuncahyono, Trias. 2012. *Musim Semi di Suriah, Anak-Anak Sekolah Penyulut Revolusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Larsen, Rozanne. 2011. Youth exclusion in Syria: Social, economic and institutional dimensions. *journalistsresource.org*, [internet] 11 agustus. Tersedia di

<http://journalistsresource.org/studies/government/international/youth-exclusion-in-syria-economic/>[diakses pada 8 April 2012]

MENA Programme: Meeting Summary. *The Political Outlook for Syria*. (London: 2012)

Morgenthau, Hans J dan Kenneth W. Thompson. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Novosti, Ria. 2010. "Russian Navy to base warships at Syrian port after 2012," *en.rian.ru* [internet] 08 Februari. Tersedia di: <http://en.rian.ru/Rusia/20100802/160041427.html>. [diakses pada 12 desember 2012]

Tilford, Robert. 2011. Russian interest in Syria goes well beyond weapons trade and involves national and international security concerns. *allvoices.com* [internet] 2 februari. Tersedia di : <http://www.allvoices.com/contributed-news/10686300-russian-interest-in-syria-goes-well-beyond-weapons-trade-and-involves-national-and-international-security-concerns>> [diakses pada 12 januari 2012]

Wibisono, B Kunto. 2012. Rusia-China veto resolusi Dewan Keamanan Soal Suriah. *antaranews.com* [internet] 2 juni. Tersedia di: <<http://www.antaranews.com/print/322528/rusia-china-veto-resolusi-dewan-keamanan-soal-suriyah>>[diakses pada 23 mei 2013]